



Kisruh APBD DKI 2015

Pembangunan Di Seluruh Wilayah Mandek

JAKARTA – Kekisruhan antara Pemerintah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 belum juga selesai. Akibatnya, program pembangunan di wilayah-wilayah DKI telantar hingga kini. “Seharusnya kami sudah bisa mulai membeli peralatan banjir,” kata Lurah Bidara Cina, Jakarta Timur, Nasrudin, kemarin.

Menurut dia, program kelurahannya yang terhambat berkaitan dengan pengadaan alat-alat kesehatan, ketertiban, dan kebersihan. Selain itu, program penanganan bencana kelurahan yang dijadikan program unggulan belum dapat dimulai. “Mau tidak mau kami harus menunggu.”

Adapun program layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dia mengatakan sebisa mungkin tak mengorbankan keperluan masyarakat yang datang ke kelurahan. Karena itu, ia harus merogoh tabungannya untuk membantu kelangsungan pelayanan masyarakat. “Kini yang jadi prioritas adalah layanan masyarakat,” kata dia.

Hal senada diungkapkan Camat Tebet, Jakarta Selatan, Mahludin, yang menunggu pencairan dana APBD untuk program unggulan di wilayahnya, yakni pembangunan jalur di Taman Honda seluas 5 hektare. “Seharusnya dikerjakan pada tahun ini oleh Dinas Pertamanan,” kata dia kemarin.

Sedangkan Camat Koja, Jakarta Utara, Rahmat Effendi Lubis, mengatakan kegiatan unggulan yang paling terkena dampak lantaran APBD 2015 belum

disahkan adalah program fisik. Kalau nanti anggaran disahkan dan disalurkan ke kecamatan, kata dia, pembangunan akan telat serta penyerapan anggaran tidak akan maksimal sampai akhir tahun. “Untuk kegiatan penyuluhan dan pos pelayanan terpadu tetap berjalan,” kata Rahmat.

Salah satu program yang pasti terhambat adalah perbaikan Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. “Pengguna jalan pun harus bersabar menunggu perbaikan lubang jalan,” kata Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Denny Ramdani.

Adapun program-program rutin, seperti pengawasan lingkungan atau layanan harian warga, tetap berjalan. Hanya, hingga saat ini tidak ada anggaran untuk membayar pekerja harian lepas (PHL) yang membantu program kecamatan. Walhasil, Denny mengaku harus menalangi terlebih dulu kebutuhan harian para pekerja. “Saya terpaksa merogoh kocek dari gaji pokok untuk uang makan PHL.”

Dalam rangka menyudahi kekisruhan pembahasan APBD DKI 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah mengatakan pemerintah DKI akan menyusun anggaran sendiri dengan jumlah anggaran berplafon APBD Perubahan 2014 dan mengajukan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri. “Begitu Mendagri setuju dan diketok, semua jalan terus. April mendatang program bisa berjalan lagi.”

Direktur Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengata-

kan molornya pengesahan APBD DKI Jakarta punya imbas yang sangat luas. Dia mengatakan, hingga bulan ketiga tahun ini, belum ada program kegiatan yang bisa dieksekusi oleh warga. “Pelayanan publik pasti terganggu,” kata dia.

● YOLANDA RYAN ARMINDYA | MAYA NAWANGWULAN | HUSSEIN ABRI YUSUF | DIMAS SIREGAR | RAYMUNDUS RIKANG